

## PENINGKATAN KUALITAS GURU DI INDONESIA: TANTANGAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA MELALUI KEBIJAKAN

Agus Susanto<sup>1(\*)</sup>, Shinta Diana<sup>2(\*)</sup>, Hauna Aprilia Mumtahanah<sup>3(\*)</sup>, Wahyudin<sup>4(\*)</sup>,  
Defi Tri Mulyani<sup>5(\*)</sup>, Pirdaus Alandes<sup>6(\*)</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia<sup>12n</sup>

[14081975agus@gmail.com](mailto:14081975agus@gmail.com)<sup>1</sup>, [shintadiana513@gmail.com](mailto:shintadiana513@gmail.com)<sup>2</sup>,

[haunaapriliamumtahanah756@gmail.com](mailto:haunaapriliamumtahanah756@gmail.com)<sup>3</sup>, [wahyudinchannel2799@gmail.com](mailto:wahyudinchannel2799@gmail.com)<sup>4</sup>,

[defitri2512@gmail.com](mailto:defitri2512@gmail.com)<sup>5</sup>, [alandespiraus24@gmail.com](mailto:alandespiraus24@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstract

Improving teacher quality is a strategic element in improving the quality of national education. However, various structural and systemic challenges still hinder the optimization of teachers' roles in Indonesia. This study aims to identify the main challenges in improving teacher quality and analyze the efforts made through government policies to address these challenges. The research method used is library research, involving the review of various academic literature, policy documents, and relevant research reports. The results of the study show that the main challenges include disparities in teacher competencies and qualifications, uneven distribution of teachers, especially in 3T (frontier, outermost, and disadvantaged) areas, lack of continuous professional training and development, high administrative burdens, and low teacher welfare and motivation. Analysis of government policies indicates that despite the existence of various programs such as teacher certification, the Teacher Development Program, and the digitization of training, their implementation still faces numerous obstacles. In conclusion, improving teacher quality requires more holistic, integrated, and sustainability-oriented policies, as well as equitable access to professional development.

**Keywords:** Teacher Quality, Educational Challenges, Policy.

(\*) Corresponding Author: Hauna Aprilia Mumtahanah, [haunaapriliamumtahanah756@gmail.com](mailto:haunaapriliamumtahanah756@gmail.com), 081295926105

### PENDAHULUAN

Guru merupakan elemen fundamental dalam sistem pendidikan yang berperan sebagai fasilitator pembelajaran, pembentuk karakter, dan agen perubahan sosial. Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, guru adalah “pamong” yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk watak dan kepribadian peserta didik. Kualitas guru yang baik diyakini mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kualitas guru mencerminkan kualitas pendidikan suatu bangsa.

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya peran guru dalam pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyebutkan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang memiliki fungsi, peran, dan kedudukan strategis dalam meningkatkan

mutu pendidikan nasional. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas guru menjadi isu sentral dalam berbagai program reformasi pendidikan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan dalam peningkatan kualitas guru masih sangat kompleks. Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, sekitar 42% guru di Indonesia belum memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi profesional secara optimal. Masalah ini diperparah dengan ketimpangan distribusi guru antardaerah, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta rendahnya akses terhadap pelatihan profesional yang relevan dan berkelanjutan. Perkembangan kurikulum dan teknologi juga menuntut guru untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensinya. Guru tidak lagi hanya bertugas mengajar, tetapi juga harus mampu melakukan asesmen, merancang pembelajaran berdiferensiasi, dan memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Tantangan ini memerlukan dukungan kebijakan yang responsif dan berorientasi jangka panjang.

Dengan demikian, penting untuk meninjau kembali bagaimana kebijakan pendidikan mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi guru saat ini. Melalui kajian yang komprehensif, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai permasalahan kualitas guru serta alternatif pendekatan kebijakan yang dapat mendorong perbaikan secara sistemik dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau library research. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dan literasi terkait dengan topik bahasan yang dibahas oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi beberapa langkah berikut: 1) pengumpulan sumber-sumber serta literasi seperti buku, buku digital, jurnal penelitian, serta artikel mengenai kompetensi kepribadian guru dan perkembangan karakter peserta didik; 2) melakukan proses pengumpulan data dengan mempelajari referensi yang sudah terkumpul melalui proses pemahaman, penelaahan, sintesis, dan penyimpulan; 3) memasukkan kerangka teori atau simpulan yang dihasilkan kedalam sub topik yang sesuai dengan sub topik yang terformulasikan dalam penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Guru**

Guru adalah elemen kunci dalam sistem pendidikan yang tidak hanya bertanggung jawab atas transfer ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, evaluator, bahkan sebagai agen perubahan sosial dan budaya. Dalam perspektif filosofis dan yuridis, posisi guru semakin strategis ketika dihadapkan pada tuntutan pendidikan abad ke-21 yang mengedepankan kompetensi berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi.

Dalam dunia pendidikan, istilah guru bukanlah hal yang asing. Menurut pandangan lama, guru adalah sosok manusia yang patut digugu dan ditiru. Digugu dalam arti segala ucapannya dapat dipercaya. Ditiru berarti segala tingkah lakunya harus dapat menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat. Perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu

mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. (Khadijah, 2022)

Secara normatif, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Namun, peran ini mengalami perluasan, terlebih dalam konteks Kurikulum Merdeka, di mana guru tidak lagi hanya menyampaikan materi tetapi turut mendesain pembelajaran berdiferensiasi yang memberi ruang partisipasi aktif peserta didik sesuai kebutuhan dan potensinya.

Agus F. Tambayong dalam buku “Menjadi Guru Profesional” karya Moh. Uzer Usman menjelaskan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, maka guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang di bidangkan. Penelitian terbaru oleh Sephiawardani & Bektiningsih (2023) menunjukkan bahwa kesiapan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi pendidikan di sekolah dasar. Mereka menekankan bahwa guru dituntut untuk mampu memahami filosofi kurikulum, melakukan asesmen diagnostik, serta merancang pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual.

Di sisi lain, Irnidayanti & Fadhilah (2023) menemukan bahwa banyak guru di Indonesia masih memerlukan penguatan pada kompetensi pedagogik dan reflektif. Pengembangan kualitas guru, menurut mereka, tidak bisa dilepaskan dari ekosistem pendukung yang mendorong peer learning, pelatihan berkelanjutan, serta dukungan kebijakan yang progresif. Studi tambahan oleh Yuliawati & Setiani (2024) menggarisbawahi bahwa transformasi peran guru di era digital menuntut literasi teknologi sebagai bagian dari kompetensi profesional. Guru masa kini harus mampu mengelola pembelajaran hibrida dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan keterlibatan belajar siswa.

Dengan demikian, definisi guru tidak lagi bersifat statis, tetapi terus berkembang seiring perubahan sosial, teknologi, dan kebijakan pendidikan. Guru masa kini adalah pendidik visioner yang adaptif, reflektif, dan memiliki sensitivitas terhadap konteks sosial peserta didik.

### **Kualitas Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas guru. Sejumlah studi menyatakan bahwa guru merupakan faktor paling penting yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, bahkan melebihi kontribusi kurikulum, sarana prasarana, atau kebijakan administratif (Darling-Hammond, 2000). Guru berkualitas mampu menyusun rancangan pembelajaran yang adaptif, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta mengembangkan potensi siswa secara optimal. Kualitas guru mencakup penguasaan materi, strategi pembelajaran, keterampilan komunikasi, serta sensitivitas terhadap latar belakang peserta didik. Guru yang mampu mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendekatan holistik dalam pendidikan yang menekankan perkembangan utuh siswa.

Di Indonesia, upaya peningkatan kualitas guru telah menjadi agenda nasional, terutama sejak diberlakukannya program sertifikasi guru, pelatihan berkelanjutan (*continuous professional development*), serta pendidikan profesi guru (PPG). Namun, tantangan dalam pelaksanaan program-program tersebut cukup kompleks, antara lain keterbatasan infrastruktur pelatihan, rendahnya motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi, serta ketimpangan distribusi guru berkualitas antar wilayah (Suryadarma et al., 2006).

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik minimal (S1 atau D4), terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam mencapai mutu pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Nugraha & Subekti (2023) mencatat bahwa kurangnya motivasi guru untuk terus mengembangkan diri, serta hambatan infrastruktur di daerah terpencil menjadi penghalang utama peningkatan kualitas secara nasional. Ini menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif dan desentralisasi pelatihan guru berbasis wilayah.

Selain itu, budaya birokratis dalam dunia pendidikan kadang justru membatasi kreativitas guru, dengan tuntutan administratif yang tinggi dan pengawasan yang lebih berfokus pada kepatuhan daripada inovasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru tidak cukup hanya dengan program formal, tetapi harus disertai ekosistem yang mendukung seperti iklim sekolah yang kolaboratif, kepemimpinan kepala sekolah yang inspiratif, dan dukungan komunitas pendidikan.

Berbagai studi menyimpulkan bahwa kualitas guru merupakan faktor paling menentukan dalam pencapaian hasil belajar peserta didik. Guru yang berkualitas bukan hanya memiliki penguasaan materi dan metodologi, tetapi juga mampu menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Pendidikan menjadi indikator kemajuan bangsa karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia, mutu pendidikan masih menjadi isu penting yang didiskusikan oleh berbagai pihak karena berdampak besar terhadap kualitas lulusan. Rendahnya mutu pendidikan akan menghasilkan SDM yang kurang bermutu, sehingga kebijakan pemerintah dan faktor-faktor pendukung mutu pendidikan terus dikaji. Data dari UNESCO dan PISA menunjukkan bahwa mutu pendidikan dan kualitas guru di Indonesia masih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas guru sangat diperlukan untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap penelitian terdahulu guna menemukan strategi yang tepat dalam peningkatan kualitas guru di Indonesia. (Pratama & Musthofa, 2019)

Studi oleh Abdurahman et al. (2023) membuktikan bahwa implementasi program Sekolah Penggerak mampu meningkatkan performa guru melalui pelatihan intensif dan supervisi kolaboratif. Dampaknya terlihat dalam peningkatan mutu lulusan sekolah dasar, khususnya dalam keterampilan literasi dan numerasi. Selain itu, Priyana et al. (2024) menegaskan pentingnya sinergi antara dukungan pemerintah, partisipasi komite sekolah, dan program pengembangan profesional berkelanjutan. Guru yang terfasilitasi dengan baik menunjukkan peningkatan signifikan dalam kompetensi pedagogik dan profesional, serta kinerja pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu institusi.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas guru bukan hanya tanggung jawab individu guru, melainkan membutuhkan intervensi sistemik yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ketika kualitas guru meningkat, maka potensi peningkatan mutu pendidikan nasional akan semakin terbuka lebar.

### **Tantangan Utama Dalam Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia**

- **Ketidaksihinggaan antara Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru**

Salah satu permasalahan mendasar yang terus membayangi mutu pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan antara kualifikasi akademik dan kompetensi profesional guru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28 ayat 2). Adapun kompetensi adalah seperangkat kemampuan,

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki seorang guru untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan efektif. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman terhadap prinsip-prinsip pendidikan, kemampuan mengelola kelas, hingga keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. Dalam kerangka regulasi nasional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma IV sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Secara statistik, angka pemenuhan kualifikasi tersebut terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir, yang sekilas tampak sebagai kemajuan signifikan dalam penataan sumber daya manusia pendidikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan kualifikasi tersebut tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini menandakan adanya jurang pemisah yang signifikan antara gelar akademik yang disandang oleh guru dan kemampuan riil yang mereka miliki dalam melaksanakan tugas profesionalnya di ruang kelas. (Kemendikbud, 2019).

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika berbagai evaluasi nasional, seperti Uji Kompetensi Guru (UKG), menunjukkan bahwa rata-rata nilai guru Indonesia masih berada di bawah standar yang ditetapkan. Guru-guru yang telah tersertifikasi dan memiliki kualifikasi formal sering kali belum mampu mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif, adaptif, dan kontekstual. Kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang menjadi pilar dalam praktik pendidikan tidak otomatis terbangun melalui pendidikan formal semata. Banyak guru mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik, melakukan asesmen autentik, serta mengelola proses belajar yang bermakna dan inklusif. Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan karakter siswa, ketimpangan ini menjadi penghambat utama tercapainya tujuan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individu. Dengan demikian, ketimpangan antara kualifikasi dan kompetensi guru merupakan isu struktural yang harus dipahami sebagai akar dari berbagai permasalahan dalam pendidikan Indonesia. Selama sistem masih menekankan pada aspek formalitas kualifikasi tanpa memperkuat kualitas kompetensi yang nyata, maka mutu pendidikan nasional akan sulit mencapai kemajuan yang signifikan.

- **Ketimpangan Distribusi Guru (Perkotaan vs. Daerah 3T)**

Krisis pendidikan di berbagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan mendalam. Daerah-daerah ini sering kali terletak di lokasi yang sulit dijangkau, memiliki infrastruktur yang minim, serta menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang signifikan (Ayudhia Nur Luthfia, 2023). Salah satu masalah paling mendasar adalah kekurangan jumlah guru dan tenaga pendidik yang berkualitas. Banyak daerah 3T mengalami distribusi guru yang tidak merata, dengan rasio antara guru dan siswa yang sangat tinggi. Ketimpangan jumlah guru terjadi antara sekolah perkotaan dengan sekolah pedesaan, sekolah di Jawa dengan luar Jawa, dan sekolah Jakarta dengan luar Jakarta. Di beberapa daerah, lebih dari 20 siswa per guru dianggap tidak memadai. Dari data yang diperoleh dari blog.sahabat pedalaman, sekitar 62% guru di daerah tertinggal memiliki kualifikasi di bawah D4/S (Putri Shaian, 2022). Hal ini berkontribusi pada rendahnya mutu pendidikan yang telah diterima oleh siswa di daerah tersebut.

Peserta didik di daerah 3T (sebenarnya juga di sekolah-sekolah pinggiran kota atau bahkan di kota sendiri) tidak mendapatkan pendidikan yang standar, mulai dari guru, kelas, fasilitas, hingga sumber belajar. Sekolah Dasar hanya punya satu, dua, atau tiga guru, yang salah satunya merangkap sebagai kepala sekolah. Tidak ada pakaian seragam merah putih, sepatu, bahkan lantainya tanah alias tak berubin. Biasanya, masalah penempatan guru muncul karena ada kekurangan guru di daerah tertentu. Akibatnya, guru-guru yang sudah ada harus mengajar mata pelajaran lain agar kebutuhan siswa tetap terpenuhi. Kekurangan guru ini seringkali terjadi di daerah-daerah terpencil, karena distribusi guru belum merata di wilayah tersebut.

- **Kurangnya Pelatihan Guru dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan**

Tantangan atau hambatan lain dalam peningkatan kualitas guru di Indonesia adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi guru. Guru merupakan agen utama dalam proses pendidikan, dan peningkatan kualitas mereka sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Di daerah pedesaan, guru sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menghadapi perubahan kurikulum dan tantangan pembelajaran abad ke-21. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya perhatian dari pihak yang berwenang terhadap pentingnya pengembangan profesional guru di daerah terpencil. Menurut studi dari The World Bank (2021), pelatihan berkelanjutan bagi guru dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Guru yang tidak memiliki akses pada pelatihan cenderung menggunakan metode pembelajaran tradisional yang kurang interaktif dan tidak menarik bagi siswa. Hal ini berakibat pada rendahnya motivasi belajar siswa dan minimnya perkembangan keterampilan yang relevan dengan tantangan saat ini.

- **Beban Administratif yang Berlebihan**

Meskipun tugas utama guru adalah mendidik dan menginspirasi siswa, mereka seringkali juga dituntut untuk menangani berbagai tugas administratif. Terlalu banyaknya tugas administratif seringkali menjadi dilema bagi guru, karena dapat mengganggu kualitas mengajar mereka. Tidak sedikit kita menyaksikan berbagai media, adanya keluhan guru-guru dan pemerhati pendidikan terkait sistem Pendidikan Indonesia yang sangat memberatkan guru dari sisi administrasi. Padahal, tugas utama mereka adalah mendidik para peserta didik bukan malah waktunya habis di depan monitor.

Salah satu dilema utama yang dihadapi guru adalah alokasi waktu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang menarik dan efektif seringkali terpakai untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif. Hal ini dapat mengurangi waktu yang dapat mereka habiskan untuk merenungkan cara terbaik untuk mengajar siswa mereka. Akibatnya, kualitas pengajaran bisa terpengaruh karena kurangnya persiapan yang matang.

Selain itu, terlalu banyaknya tugas administratif juga dapat meningkatkan tingkat stres dan kelelahan bagi guru. Menyusun laporan, mengisi formulir, dan mengelola dokumen-dokumen lainnya memerlukan waktu dan energi yang tidak sedikit. Hal ini bisa menjadi sumber frustrasi bagi guru, karena mereka merasa waktu dan upaya mereka teralihkan dari tugas utama mereka yaitu mendidik. Ketika psikologi seorang guru terganggu, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap kualitas mengajarnya di kelas.

- **Rendahnya Kesejahteraan dan Motivasi Guru**

Kesejahteraan guru yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kesejahteraan guru meliputi material dan non material yang diberikan selama bertugas menjadi guru. Guru di

Indonesia saat ini dinilai cukup jauh dari kondisi sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persen kesejahteraan guru terdiri dari 4% tidak sejahtera, 48% kurang sejahtera, 40% sejahtera, dan 8% sangat sejahtera. (Raudhah, 2020)

Apabila kita lihat lebih jauh, pemerintah Indonesia seringkali masih mengabaikan kesejahteraan guru terutama pada daerah tertinggal. Sehingga berdampak kepada sedikitnya jumlah masyarakat yang tertarik untuk menjadi guru akibat rendahnya penghasilan dan tingkat kesejahteraan guru. Memperbaiki kesejahteraan guru sebenarnya juga sekaligus mampu menghilangkan stigma masyarakat yang menilai guru itu rendah, hal ini juga disebabkan persepsi publik yang sering membandingkan gaji guru dan dokter. Tingkat kesejahteraan guru hendaknya diutamakan guna mendorong kinerja guru yang maksimal. (Zulkifli, Darmawan, & Sutrisno, 2014)

Kesejahteraan guru termasuk upah, yakni gaji dan upah pokok maupun tunjangan tambahan. Namun, rendahnya tingkat kesejahteraan guru ini dapat kita saksikan fakta dilapangan di beberapa wilayah guru hanya mendapatkan upah dari pihak sekolah sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 300.000,- terutama kepada guru yang mengembankan tugas di daerah 3T terutama guru-guru honorer. Tak hanya menyangkut rendahnya upah yang mereka terima, mereka juga kerap mengeluhkan keterlambatan penerimaan upah yang sampai berbulan-bulan, bahkan guru honorer mengaku takut dan gelisah apabila suatu saat diberhentikan kontraknya. (Nugraheny, 2021) Karena pendapatan yang tidak mencukupi, banyak guru yang terpaksa mencari pekerjaan tambahan.

Minimnya kesejahteraan guru memiliki kaitan erat dengan mutu pendidikan di Indonesia. Pada konteks kesejahteraan guru, kompensasi yang diterimanya tidak sebanding dari sumbangsih yang mereka kerjakan dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa. Rendahnya taraf kesejahteraan ini berdampak terhadap lemahnya semangat dan motivasi guru dalam menjalankan tugas mengajarnya, hal tersebut secara tak langsung berimbas pada menurunnya mutu pendidikan di Indonesia. Kesejahteraan guru menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, sebab jika kesejahteraan guru baik, dengan sistem insentif yang adil dan merata, guru dapat memberikan komitmen dalam melaksanakan pelayanan yang berkualitas dan optimal kepada masyarakat.

### **Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia**

- **Sertifikasi Guru melalui PPG (Pendidikan Profesi Guru)**

Pemerintah Indonesia menjadikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai salah satu strategi penting dalam meningkatkan mutu dan profesionalitas tenaga pendidik. Program ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa seorang guru harus memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, serta memiliki sertifikat pendidik dengan kondisi jasmani dan rohani yang sehat. PPG terdiri dari dua jenis, yaitu PPG Prajabatan bagi calon guru dan PPG Dalam Jabatan untuk guru aktif yang belum tersertifikasi. Tujuan dari program ini adalah membentuk guru yang memiliki kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional sesuai dengan standar nasional (Hanum & Handayani, 2024). Hasil studi menunjukkan bahwa guru yang telah mengikuti program ini cenderung lebih baik dalam menyusun rencana pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran aktif, serta melakukan evaluasi pembelajaran secara reflektif (Priandari et al., 2023). Di sisi lain, pelaksanaan PPG masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kuota dan akses ke LPTK di wilayah terpencil, rendahnya literasi teknologi digital di kalangan guru, serta lemahnya sistem evaluasi berkelanjutan

terhadap dampak sertifikasi (Mustaqim, 2023). Di beberapa daerah, terutama yang berada dalam kategori tertinggal atau pasca-konflik, proses sertifikasi cenderung dipahami sebagai kewajiban administratif untuk mendapatkan tunjangan, bukan sebagai upaya peningkatan mutu secara substansial (Nurhafni, 2023). Oleh sebab itu, dibutuhkan berbagai langkah penguatan, seperti pemerataan akses, peningkatan kapasitas LPTK, penguatan infrastruktur pendidikan, serta program pengembangan profesional guru pasca-sertifikasi, agar PPG benar-benar dapat menjadi instrumen utama dalam membentuk guru yang berkualitas dan siap menjawab tantangan pendidikan di era global (Javiarma et al., 2023).

- **Guru Penggerak**

Guru Penggerak merupakan program prioritas yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai upaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih merdeka, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Program ini bertujuan mencetak guru-guru unggul yang tidak hanya kompeten dalam mengajar, tetapi juga mampu menjadi pemimpin pembelajaran di satuan pendidikannya masing-masing. Seorang Guru Penggerak diharapkan memiliki kemampuan untuk mentransformasi budaya sekolah, menginisiasi perubahan positif, serta mendorong kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.

Dalam implementasinya, Guru Penggerak diberi pembekalan melalui pelatihan intensif yang mengedepankan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), refleksi, dan praktik nyata di sekolah. Kurikulum pelatihannya mencakup penguatan kompetensi sosial-emosional, pembelajaran berdiferensiasi, kepemimpinan pembelajaran, serta pemahaman terhadap paradigma Merdeka Belajar. Setelah menyelesaikan program, Guru Penggerak diharapkan mampu memfasilitasi pengembangan guru lain, menjadi pemimpin dalam komunitas belajar, serta berkontribusi aktif dalam pengambilan kebijakan di sekolah (Putri & Haryono, 2023).

Secara nyata, kehadiran Guru Penggerak telah membawa dampak positif terhadap budaya belajar di sekolah. Guru menjadi lebih terbuka terhadap kolaborasi, inovasi pembelajaran meningkat, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar pun makin aktif (Wibowo & Mulyani, 2023). Namun, tantangan masih dijumpai, seperti keterbatasan dukungan dari kepala sekolah, resistensi dari rekan sejawat yang belum terpapar program, serta kebutuhan akan pendampingan berkelanjutan pasca-program (Ramadhan, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara dinas pendidikan, kepala sekolah, dan komunitas belajar di lingkungan sekolah. Dengan penguatan peran Guru Penggerak secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan mereka dapat menjadi katalis utama dalam menciptakan transformasi pendidikan yang holistik dan berkelanjutan di Indonesia.

- **Digitalisasi dan Platform Merdeka Mengajar (PMM)**

Dalam rangka menghadirkan sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai bagian dari upaya digitalisasi pendidikan nasional. PMM dirancang sebagai sarana digital yang mendukung

guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, serta menjadi wadah pengembangan kompetensi secara mandiri dan berkelanjutan.

Platform ini menyediakan berbagai fitur, seperti video pembelajaran, pelatihan mandiri, perangkat ajar, asesmen diagnostik, dan refleksi pembelajaran, yang semuanya dapat diakses secara gratis oleh guru. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi guru dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran dengan lebih fleksibel dan kontekstual (Sari & Kurniawan, 2023). Guru tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga dapat menjadi kontributor konten, sehingga terjadi pertukaran pengetahuan yang kolaboratif antar pendidik.

Digitalisasi melalui PMM telah membantu menjembatani kesenjangan akses terhadap sumber belajar, terutama di wilayah dengan keterbatasan pelatihan atau bimbingan teknis. Selain itu, data penggunaan PMM juga menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*) dalam pengembangan kapasitas guru (Putra & Lestari, 2023). Dengan adanya fitur pelatihan mandiri, guru dapat mengikuti modul peningkatan kompetensi kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan mereka.

Namun demikian, implementasi PMM tidak lepas dari tantangan, seperti disparitas akses internet, keterbatasan perangkat digital, serta rendahnya literasi digital di sebagian daerah. Di samping itu, motivasi dan kesadaran guru untuk belajar secara mandiri juga menjadi faktor penentu dalam efektivitas platform ini (Handayani, 2023). Oleh sebab itu, dukungan dari pemerintah daerah, penguatan ekosistem digital sekolah, serta peningkatan kapasitas teknologi informasi guru sangat diperlukan untuk memastikan digitalisasi melalui PMM dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Dengan pengembangan dan penguatan Platform Merdeka Mengajar secara menyeluruh, digitalisasi pendidikan diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang merdeka, relevan, dan berpihak pada kebutuhan siswa di seluruh pelosok Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Peningkatan kualitas guru di Indonesia merupakan kunci utama dalam membangun sistem pendidikan yang unggul dan merata. Permasalahan seperti ketimpangan kompetensi, distribusi yang tidak adil, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta rendahnya kesejahteraan dan motivasi guru menunjukkan adanya tantangan struktural yang kompleks. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan koordinatif. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan yang telah berjalan agar peran strategis guru sebagai agen perubahan pendidikan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

## **SARAN/REKOMENDASI**

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan yang kontekstual, pemerataan distribusi guru yang adil, serta pengurangan beban administratif. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan pelibatan guru dalam perumusan kebijakan sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif dan berdaya saing. Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pertumbuhan profesional guru secara merata dan berkeadilan. Dengan komitmen bersama dan kebijakan yang berpihak pada penguatan

kapasitas guru, maka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia bukan hanya menjadi harapan, tetapi keniscayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A., Setiawati, Hidayat, U. S., Budiman, D., & Pradesa, K. (2023). *The Influence of Sekolah Penggerak and Teacher Performance on the Quality of Elementary School Graduates*. *Journal for Lesson and Learning Studies*, 6(2), 190–198. <https://doi.org/10.23887/jlls.v6i2.60817>
- Azri., & Qaulan Raniyah. (2024). “Peran Teknologi Dan Pelatihan Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan”. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*. Vol. 3, No. 4.
- Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. *Education Policy Analysis Archives*, 8(1), 1–44. <https://doi.org/10.14507/epaa.v8n1.2000>
- Handayani, N. (2023). *Analisis Kesiapan Guru dalam Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar di Daerah 3T*. *Jurnal Pendidikan Digital*, 4(3), 123–134.
- Hanum, L., & Handayani, R. (2024). *Implementasi Sertifikasi Guru Melalui PPG: Tinjauan Sosialisasi dan Efektivitas Kebijakan*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*.
- Hutasuhut, Saidun., Irma Siagian., Harrington Silaban., dkk. (2025). “Kesejahteraan Guru di Indonesia”. *FUTURE ACADEMIA: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*. Volume 3, Nomor 1.
- Irnidayanti, Y., & Fadhilah, N. (2023). *Teaching Quality in Indonesia: What Needs to Be Improved?* In R. Maulana, M. Helms-Lorenz, & R. M. Klassen (Eds.), *Effective Teaching Around the World* (pp. ...). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-31678-4\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-031-31678-4_10)
- Javiarma, R., Kurniawan, D., & Yuliani, E. (2023). *Lesson Planning and Pedagogical Development through PPG: A Mixed Methods Study*. *Jurnal Pendidikan Guru*.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Laporan Hasil Uji Kompetensi Guru Nasional*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khadijah, I. (2022). *Definisi Dan Etika Profesi Guru*.
- Luthfia, Ayudia Nur., Nabila Putri Wahididiah., Desy Safitri., & Sujarwo Sujarwo. (2023). “Analisis Problematika Pendidikan Indonesia Di Wilayah 3T”. *GURUKU: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Vol. 1 No. 4.
- Maryani, I., Hasanah, E., & Suyatno. (2022). *Asesmen Diagnostik: Pendukung Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka*. Yogyakarta: Multi Persada Press.
- Mustaqim, M. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan PPG dalam Jabatan dan Dampaknya terhadap Kompetensi Guru*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Nugraha, R., & Subekti, A. (2023). *Kendala Profesionalisme Guru di Daerah 3T: Analisis Perspektif Kebijakan Pendidikan Inklusif*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 30(2), 120–131.
- Nurhafni, I. (2023). *Politik Sertifikasi Guru di Wilayah Tertinggal: Antara Kesejahteraan dan Profesionalisme*. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*.
- Pratama, A. I., & Musthofa, M. (2019). *Konsep Kepribadian Guru Menurut Ibnu Sahnun*. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 94.
- Priandari, N., Suwandi, S., & Aisyah, F. (2023). *PPG dan Profesionalisme Guru: Studi Kasus di SMK Singaraja*. *Jurnal Pendidikan Profesi*.

- Priyana, Y., Rizqi, V., & Mayasari, N. (2024). *Analysis of the Effectiveness of Professional Development Programs, School Committee Participation, and Government Support on Teacher Performance in East Java*. *West Science Interdisciplinary Studies*, 2(9), 1812–1822. <https://doi.org/10.58812/wsis.v2i09.1304>
- Putra, R. A., & Lestari, D. (2023). *Digitalisasi Pendidikan dan Tantangan Transformasi Digital di Sekolah*. *Jurnal Kebijakan dan Teknologi Pendidikan*, 5(2), 88–97.
- Putri Shaian. (2022). *Lika-Liku Masalah Pendidikan di Daerah 3T*. Artikel. Diakses pada 7 Juni 2025 dari sahabat pedalaman website: <https://blog.sahabatpedalaman.org/pendidikan-daerah-3t/>
- Putri, A. D., & Haryono, A. (2023). *Peran Guru Penggerak dalam Kepemimpinan Pembelajaran di Era Merdeka Belajar*. *Jurnal Kepemimpinan dan Inovasi Pendidikan*, 5(2), 101–110.
- Ramadhan, F. (2023). *Kendala dan Strategi Implementasi Program Guru Penggerak di Daerah*. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Daerah*, 3(3), 88–96.
- Raudhah. (2020). “Hubungan Tingkat Kesejahteraan Guru Dengan Semangat Kerja Guru”. *Jurnal Guru Dikmen Dan Dikus*. Volume 3 Number 2.
- Sari, M. P., & Kurniawan, H. (2023). *Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dalam Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar*. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 6(1), 45–54.
- Sephiawardani, N. A., & Bektiningsih, K. (2023). *Review of Teacher Readiness in Implementing Merdeka Curriculum at Public Elementary Schools*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 56(3), 533–542. <https://doi.org/10.23887/jpp.v56i3.67628>
- Suryadarma, D., Suryahadi, A., Sumarto, S., & Rogers, H. (2006). Improving student performance in public primary schools in developing countries: Evidence from Indonesia. *Education Economics*, 14(4), 401–429. <https://doi.org/10.1080/09645290600854120>
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Wibowo, T., & Mulyani, R. (2023). *Dampak Implementasi Program Guru Penggerak terhadap Budaya Belajar Sekolah*. *Jurnal Pendidikan Transformasi*, 4(1), 55–67.
- Yuliatwati, D., & Setiani, N. (2024). *Transformasi Peran Guru dalam Pembelajaran Digital Pasca Pandemi Covid-19*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 26(1), 22–33. <https://doi.org/10.31227/osf.io/qt7re>